

SEMINAR NASIONAL

**Hari Ulang Tahun
Golkar Ke-46**

JAKARTA, 16 OKTOBER 2010

INDONESIA DAN NASIONALISMENYA

oleh
Franz Magnis-Suseno

Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menempatkan "nasionalisme" di nomor satu dari deretan lima nilai Pancasila. Soekarno tahu mengapa. Hanya karena kesadaran bahwa "kita ini satu bangsa, bangsa Indonesia", maka masyarakat-masyarakat yang sedemikian beraneka ragam, yang hidup di kepulauan Nusantara antara Asia dan Australia/Oseania, bisa menjadi satu Indonesia. Nasionalisme bagi Bung Karno adalah cinta sepenuh hati kepada Indonesia, rasa bangga bahwa "kita orang Indonesia", adalah suatu rasa persatuan di antara orang-orang yang sedemikian berbeda, yang terbangun dalam sebuah sejarah penderitaan karena

penjajahan dan perjuangan pembebasan bersama selama ratusan tahun.

Sekarang, 65 tahun kemudian banyak orang bertanya: Apakah kebangsaan Indonesia masih berarti sesuatu bagi bangsa Indonesia? Apakah kenyataan bahwa kita ini orang Indonesia masih dapat menggerakkan sesuatu dalam hati kita? Padahal, bagi Sukarno kebangsaan merupakan sila paling inti, paling berharga dalam Pancasila. Hanya karena kebangsaannya bangsa Indonesia ada.

Memang, rasa kebangsaan masih ada. Setiap kali terjadi peristiwa seperti beberapa minggu lalu nasionalisme Indonesia seakan-akan bangkit – dan bahkan memperlihatkan diri dalam bentuk yang kadang-kadang miring. Enam minggu lalu sebuah patroli polisi laut Malaysia menahan tiga orang petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau di perairan di perairan kita, di sebuah bagian yang juga diklaim oleh Malaysia. Kalau ada peristiwa seperti itu terjadi, jiwa bangsa bisa menjadi emosional.

Namun kalau tidak ada peristiwa yang membangunkan emosi seperti itu rasa kebangsaan kita sering rada mineur. 12 tahun sesudah demokrasi didirikan di Indonesia, 65 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan dan 102 sesudah permulaan Kebangkitan Nasional. Intoleransi masih dan bahkan semakin menjadi masalah. Tetap masih 40% bangsa Indonesia hidup dalam kemiskinan atau hanya pas di luar

kemiskinan. Korupsi disadari mengancam secara serius kemajuan bangsa Indonesia. Rakyat mengharapkan kepemimpinan yang menunjukkan jalan ke luar, tetapi tidak kelihatan. Semakin banyak orang bertanya: Bangsa Indonesia berada di mana? Apa masa depan bangsa? Di mana bangsa ini 20 tahun lagi?

NASIONALISME INDONESIA

Sebelum kita bertanya tentang situasi sekarang, sebuah refleksi atas ciri khas nasionalisme Indonesia adalah pada tempatnya.

Sudah sering ditegaskan – tentu terutama sudah oleh Sukarno – bahwa kebangsaan Indonesia bukan fakta alami. Secara alami yang mencolok hanyalah pluralitas dan perbedaan-perbedaan. Bahwa rakyat dari Sabang sampai Merauke tumbuh menjadi satu bangsa berdasarkan pengalaman penjajahan bersama. Yang tidak hanya menimbulkan penderitaan, tetapi juga kemarahan karena disadari tidak adil dan tidak benar. Dan dari perasaan itu tumbuh tekad untuk bersama, bersama bukan hanya untuk menumbuhkan penjajah, melainkan untuk mewujudkan negara untuk bersama-sama menanggulangi tantangan raksasa menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan adil.

Jadi nasionalisme Indonesia bersifat *etis*. Dasarnya bukan kesatuan bahasa dan budaya – seperti bangsa Polandia atau Korea – melainkan tekad untuk hidup merdeka, wajar

sebagai manusia. Karena itu nasionalisme Indonesia juga bersifat humanis dan bukan *chauvinis*. Humanis dalam arti tekad untuk mewujudkan hidup bersama yang sesuai dengan harkat kemanusiaan segenap. Dalam arti bahwa segenap warga bangsa dapat hidup sesuai dengan cita-citanya, dengan identitas kultural dan religiusnya, dengan gaya hidup dan adatnya asal dalam rangka undang-undang dasar yang merupakan landasan penyelenggaraan negara Indonesia.

Sifat etis dan humanis kebangsaan Indonesia mempunyai dua implikasi. Pertama, kebangsaan Indonesia perlu terus menerus *diemong*, dipelihara baik-baik. Rasa kebangsaan bisa mengering, menguap, lantas bangsa tidak ada lagi. Implikasi kedua adalah bahwa atas dasar kebangsaan segenap warga bangsa dihormati dalam keutuhannya.

Betapa persatuan suatu bangsa majemuk seperti bangsa Indonesia bukan barang tentu kita saksikan di banyak wilayah di dunia, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa (Timur) dan di Afrika. Tetapi terutama kita mengalaminya di Indonesia. Sekarang, seratus tahun sesudah permulaan kebangkitan nasional, 80 tahun sesudah Sumpah Pemuda, kita dengan getar menyaksikan betapa banyak darah sudah mengalir, hampir sejak tahun pertama sesudah Proklamasi. Darah yang tidak dicurahkan oleh penjajah dalam rangka mempertahankan kekuasaannya, bukan juga oleh musuh luar, melainkan oleh bangsa sendiri. Hampir tak habis-habisnya

pembunuhan atas nama balas dendam, suku, agama, ideologis kelas, persatuan bangsa, bahkan Pancasila.

NASIONALISME INDONESIA DI ABAD KE-21

Dengan demikian satu hal jelas: Nasionalisme merupakan sikap hati manusia Indonesia yang hakeki bagi masa depan bangsa. Di Eropa kata nasionalisme sering mendapat nada negatif, dekat denan chauvinisme, karena nasionalisme berlebihan membawa Eropa - dan dunia - ke dalam sekian banyak perang yang amat mengerikan.

Tetapi nasionalisme kita bukan demikian. Nasionalisme kita bukan nasionalisme etnis, melainkan nasionalisme kebangsaan, ya bangsa Indonesia. Yang mempersatukan kementerian masyarakat dari Sabang sampai Merauke adalah tekad untuk bersama, ya rasa kebangsaan, ya nasionalisme. Di abad ke-21 nasionalisme itu tidak bisa hidup lagi dari semangat anti penjajah - bagi kebanyakan kita penjajahan sudah jauh sekali di masa lampau. Dan tentu kita menolak nasionalisme yang chauvinistik, yang hidup dari membuat rendah bangsa-bangsa lain. Kita juga tahu bahwa kita jangan jatuh ke dalam nasionalisme kekanak-kanakan seperti kadang-kadang muncul kalau ada ketegangan dengan tetangga Malaysia (bagaimana kita sebaiknya menghadap bangsa-bangsa tetangga dapat kita belajar dari Presiden ke-2 R. I., Soeharto).

Yang kita perlukan adalah nasionalisme positif yang mendorong kita untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, yang menumbuhkan solidaritas di antara kita, solidaritas horisontal: antara suku, etnik, agama, aliran agama, dan solidaritas vertikal, antara yang sudah sejahtera (dan kaya, ada yang ekstrem kaya) dan yang belum, apalagi dengan yang miskin. Nasionalisme itu berarti bahwa kita bangsa menjadi orang Indonesia, gembira kalau bangsa maju, sedih kalau bangsa mundur, terharu kalau bertemu dengan simbol-simbol bangsa di tempat yang tak tersangka.

NASIONALISME DALAM TANTANGAN

Akan tetapi, nasionalisme itu sekarang ditantang. Ditantang dari empat sudut.

(1) Budaya hedonis konsumerisme

Secara sederhana: yang dimaksud di sini adalah kecenderungan kelas menengah atas di kota-kota besar, khususnya di Jakarta, untuk memakai kekayaan yang mulai mereka cicipi untuk larut dalam kecemerlangan *mall-mall*. *The golden crowd*. Tergantung kemampuan finansialnya, mereka itu kita lihat di *mall-mall*, berbelanja. Khususnya *konsumerisme*: Konsumerisme adalah napsu untuk membeli demi membeli. Bukan kebutuhan nyata yang menjadi sebab saya membeli sesuatu di *mall*, melainkan karena saya suka beli-beli. *Shopping* sebagai bentuk rekreasi. Yang kelihatan *asyik*, yang *trendy*, yang *in*, yang lebih baru, itulah yang mau dibeli. Du-

nia iklan sebagian besar memainkan napsu itu. Bukan bahwa orang memerlukan sesuatu, atau memang meminati sesuatu biar agak luks itulah masalah konsumerisme, melainkan bahwa dia beli untuk beli. Umpamanya berhasil membeli *handy* yang betul-betul canggih dan praktis: Berikut kali dia lewat tempat *handy* yang *asyik* ia akan membeli lagi. Handy yang sudah dibeli, yang barangkali mahal, tetapi sangat cocok dengan semua kebutuhannya, dilupakan. Yang menarik adalah *membeli handy*, bukan *handynya*. Mereka tentu tidak tahu bahwa mereka dimanipulasi oleh promosi dalam iklan.

Orang yang larut dalam konsumerisme kehilangan jati diri. Ia menilai diri, harganya sendiri, dari kesesuaiannya dengan *image-image* orang-orang *happy*, *rich*, *relaxed* yang kita lihat di iklan-iklan. Mereka menjadi ketagihan *life style* yang mahal-mahal, ke disko atau tempat makan yang mahal, perjalanan yang mahal. Tak ada batasnya. *Spending habits mereka* semakin di luar segala proporsi.

Konsumerisme itu mengeringkan kepedulian sosial, perhatian pada bangsa, apa pun yang melampaui dirinya sendiri. Tak ada akhir di lereng miring itu. Orang-orang itu tidak lagi peduli dengan politik - selama ekonomi maju. Konsumerisme ini ancaman bagi seluruh masyarakat. Orang kecil pun terpesona, ingin masuk ke kalangan mereka. Kerja keras bertanggungjawab tidak lagi menarik. Mereka mencari jalan pintas, entah lewat kejahatan terorganisasi, misalnya narkoba, entah lewat koneksi dan korupsi, entah lewat

dukun atau main judi. Tak dapat diragukan, konsumerisme merupakan bahaya besar bagi substansi etis dan sosial masyarakat kita.

(2) Korupsi

Hedonisme, keinginan untuk menikmati sendiri, yang kosong cita-citanya menunjukkan wajahnya yang buruk dalam korupsi yang semakin merajalela. Korupsi itu bukti paling utama bahwa sebagian besar reformasi gagal. Korupsi itu paling gawat karena sudah merasuk ke dalam kelas politik, dan karena rakyat mendapat kesan bahwa pimpinan nasional tidak berminat menindaknya.

Secara praktis-konkret saya menganggap korupsi sebagai ancaman terbesar yang dihadapi negara kita. Soalnya, korupsi menggerogoti substansi kebangsaan kita: Substansi moral, substansi sosial, kompetensi-kompetensi yang kita miliki. Korupsi membuat kita dari atas sampai ke bawah menjadi orang yang tidak jujur. Itu fatal. Orang yang tidak jujur tidak lagi tahu apa itu keadilan. Ia tidak tahu apa arti tanggungjawab. Dan ia tidak lagi meminati mutu outputnya. Karena itu kompetensi-kompetensi yang barangkali dimiliki menjadi tidak efektif karena bukan kualitas outputnya, melainkan keuntungan pribadi yang menjadi motivasinya. Kalau kita tidak berhasil memberantas korupsi, bangsa kita akan gagal.

Korupsi itulah yang mengancam hasil reformasi yang paling penting dan paling dibanggakan: demokrasi Indonesia. Demokrasi kita tidak akan runtuh karena segala macam kelemahan yang masih melekat padanya, juga tidak karena ancaman dari kekuatan-kekuatan anti-demokratis, melainkan dari dalam, dalam korupsi kelas politik di negara kita ini. Kalau misalnya 50% anggota DPR seharusnya di penjara, demokrasi kita sudah dalam krisis. Kalau panggilan politik direndahkan menjadi sarana untuk memperkaya diri dan keluarga, kalau demokratisasi pasca Suharto menjadi sama dengan demokratisasi korupsi, demokrasi kita berada dalam situasi gawat.

Catatan keras ini harus cukup. Korupsi erat sekali berkaitan dengan konsumisme yang mengasingkan kita dari diri kita yang sebenarnya. Korupsi juga yang memotori egoisme kedaerahan (dan bukan keinginan untuk memajukan daerah kita). Dan bau kebusukan masyarakat yang korup sampai ke tulang sumsumnya akan membuka pintu bagi mereka yang puritan, picik, fanatik untuk menawarkan sebuah Indonesia yang baru, yang tidak lagi terbuka dan tidak lagi demokratis.

(3) Intoleransi dan kepicikan

Lawannya hedonisme nir-cita-cita, nir-idealisme, adalah kepicikan dan fanatisme berdasarkan keagamaan yang salah dimengerti. Tidak perlu mencari jauh-jauh. Kepicikan bisa bersifat antar kampung dan antar desa, antar suku dan etnik,

antar umat beragama. Lihat saja segala perkelahian. Lihat saja konflik-konflik serius yang dalam 12 tahun terakhir kita alami di beberapa daerah antar suku maupun antar umat beragama. Yang khususnya mengkhawatirkan adalah kepicikan religius. Kecurigaan antar masyarakat yang berbeda agama semakin bertambah. Kadang-kadang ada kesan bahwa segala macam kemajuan dalam hubungan antar umat beragama yang telah tercapai dalam 12 tahun terakhir dan tidak dapat disangkal dan sangat menggembirakan disusul di sebelah kiri oleh tambahnya intoleransi, sikap keras dan tertutup, kadang-kadang kebencian terhadap umat lain tanpa tedeng aling-aling. Saya amat menyesalkan bahwa sudah lama mengucapkan selamat pada hari perayaan umat beragama lain diharamkan. Maklumat ini betul-betul menyunat hubungan di tingkat akar rumput antar umat beragama. Ambil intoleransi terhadap minoritas-minoritas, kebrutalan terhadap apa yang dijuluki "ajaran sesat", kebrutalan massa yang justru panas keagamaan.

Bangsa yang majemuk tidak bisa hidup bersama dengan damai apabila kepicikan dan intoleransi menang. Secara sederhana, kita harus mau saling menerima. Untuk itu memang perlu usaha. Mayoritas masing-masing harus menjadi dewasa, mengatasi kecenderungan untuk main boss besar terhadap minoritas dan harus merasa bertanggungjawab, serta bangga, atas kesejahteraan, kebebasan, dan integrasi minoritas-minoritas. Dan minoritas, daripada mau membuktikan kehebatan diri dengan misalnya membangun gere-

ja-gereja yang mentereng, tidak proporsional terhadap kedudukan mereka dalam masyarakat, atau puas diri dalam isolasi dari sisa masyarakat, harus belajar untuk empati, untuk tidak provokasi, untuk memperhatikan perasaan mayoritas, untuk mengambil inisiatif untuk mendekati mereka dan membangun hubungan.

Justru rasa kebangsaan yang kuat, yang memberi semangat, akan merupakan aset amat penting dalam mempersatukan masyarakat yang beraneka warna.

(4) Ketidakadilan sosial

Tantangan persatuan bangsa kedua, barangkali yang paling terasa dari semua, adalah kemiskinan lebih dari 40 juta saudara dan saudari kita, dan bahwa lebih dari 100 juta orang kita hanya hidup pas-pasan. Kesenjangan ekonomis mengancam memecahkan bangsa Indonesia secara vertikal. 63 tahun kemerdekaan dan hampir setengah warga bangsa masih tetap tidak sejahtera, aman secara ekonomis dan sosial. Dan mereka melihat bagaimana yang lain itu maju terus. Bagaimana di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lain, kekayaan luar biasa bertumpuk-tumpuk. Baru saja di Pasuruan ribuan orang rebutan zakat 30.000 Rupiah, ada yang jalan berkilometer jauhnya untuk menerimanya. Keterinjakan beberapa puluh dari mereka, sebuah kecelakaan tragis, seakan-akan menjadi simbol betapa sebagian bangsa masih terancam oleh kemiskinan. Itu sesuatu yang seharusnya

membuat kita tidak dapat tidur. Kok bisa begitu banyak saudara kita masih hidup dalam kesusahan besar.

Kenyataan bahwa ada yang tidak peduli, bahwa kelas politik memberi kesan "business as usual", bahwa tidak adanya sense of crisis barangkali bisa dimengerti karena krisis keadilan dan solidaritas bangsa ini sudah berjalan begitu lama. Tetapi seharusnya kita malu. Seharusnya kita mengerahkan segala tenaga untuk menjamin kesejahteraan rakyat saudara dan saudari kita.

NASIONALISME TETAP PERLU

Nasionalisme ditantang dari sikap acuh yang mencari hidup konsumtif dengan memanfaatkan fasilitas hasil globalisasi, maupun dari pihak mereka yang mengeksklusifkan ketaatan pada salah satu ideologi ekstrem, khususnya ideologi agama. Dua-duanya menganggap nasionalisme bisa dibuang.

Akan tetapi, mereka keliru. Dan mereka berbahaya. Agar orang menjadi peserta jitu dalam permainan komunikasi global ia justru memerlukan jati diri sosial yang utuh. Jati diri sosial manusia zaman globalisasi yang kompeten tidak bisa tidak terdiri atas pelbagai lapisan sosialitas yang terintegrasi dalam kepribadian dewasa: Lapisan-lapisan itu adalah keluarga, keluarga besar/marga, kampung, daerah, umat agama lokal, agama universal, jaringan komunikasi profesi (misalnya sebagai sejarawan), barangkali pelbagai wadah *civil society*, dan bangsa. Manusia dewasa ini merealisasikan

diri secara harmonis dalam semua lingkaran kesosialan ini, dengan selalu terbuka bagi peluasan-peluasan baru. Makin lengkap jati diri sosial seseorang, makin kompeten ia akan membawa diri terhadap tantangan globalisasi.

Dan sebaliknya: Apabila orang menemukan jati dirinya secara eksklusif hanya dalam satu dari dimensi-dimensi kesosialan ini, ia akan mengalami sebuah distorsi dalam kepribadiannya dan makin lumpuh dalam kemampuannya untuk berkomunikasi. Melawan eksklusivitas ideologis, penghayatan kebangsaan merupakan aset yang penting. Sebaliknya, orang yang melihat segala apa hanya melalui kacamata agama atau, seperti almarhum komunisme, lewat kacamata keberpihakan kelas, menjadi buta nilai karena yang mereka minati bukan yang menyatakan diri sebagai pantas diminati, melainkan yang diajarkan oleh agama atau yang mendukung perjuangan kelas. Mereka bak orang yang, sebelum berani mencium harumnya bunga mawar di pinggir jalan, merasa perlu melihat dulu di buku pegangan apakah menciumi bunga boleh atau tidak.

Maka berhadapan dengan globalisasi maupun fundamentalisme ideologis nasionalisme merupakan unsur kunci dalam menjamin keterbukaan hakiki masyarakat terhadap kekayaan nilai-nilainya, kekayaan mana merupakan modal dasar untuk hidup bersama dengan baik dan sinergetik. Dalam bahasa biasa: Seseorang, maupun sekelompok orang Indonesia, tidak utuh sebagai manusia kalau tidak merasakan

cinta kepada bangsa dan negaranya, merasa bangga bahwa mereka itu orang Indonesia, kalau mereka sedikit pun tidak terharu berhadapan dengan simbol-simbol kebangsaan seperti dengan bendera nasional atau lagu kebangsaan. Mereka mesti merasa gembira kalau "orang kita" memenangkan piala Thomas dan sedih kalau mereka tidak berhasil. Mereka terpukul apabila Indonesia mengalami musibah, malu kalau aparat negaranya melakukan kejahatan. Dan apabila memang perlu, mereka juga bersedia berkorban bagi bangsa dan negara.

Andaikata rasa kebangsaan itu mati, bangsa Indonesia akan mati dan negara hancur. Soalnya, yang mempersatukan ratusan etnik, suku dan komunitas, penganut beberapa agama, yang hidup di atas ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, hanyalah kebangsaan Indonesia tak ada lain. Tak ada yang dapat menggantikan rasa kebangsaan.

Apakah rasa kebangsaan masih hidup dalam kalbu rakyat Indonesia? Cara masyarakat membawa diri dalam krisis berkepanjangan, kenyataan bahwa tendensi-tendensi disintegratif *tidak* meluas, harapan rakyat kepada pimpinan negara: Itu semua menunjukkan bahwa masih terdapat modal nasionalisme dalam bangsa Indonesia yang dapat diandalkan dalam usaha kita bersama untuk ke luar dari keterpurukan sekarang.

Tetapi modal kebangsaan itu harus dipakai. Tidak dengan nasionalisme picikan yang merasa keki karena rakyat Timor Lorosae akhirnya dapat menikmati kemerdekaan sepenuhnya. Sebuah kepemimpinan nasional yang mutu merupakan unsur kunci: Pembajakan nasionalisme untuk menutup-nutupi aib mereka oleh mereka yang berkuasa dan mampu menteror rakyat harus diakhiri. Pemberantasan korupsi secara *high profile* di lingkungan pemerintah dan wakil rakyat merupakan salah satu kunci (karena pemanfaatan fasilitas bangsa demi keuntungan pribadi itulah yang menghancurkan kredibilitas omongan tentang keluhuran bangsa).

Yang kita perlukan adalah kepemimpinan yang memiliki komitmen pada Pancasila dan masa depan bangsa, yang mempunyai visi dan keberanian. Dan legislatif yang kembali menyadari bahwa mereka tidak mendadap kedudukan enak untuk mengamankan diri dan keluarga mereka, melainkan sebagai panggilan suci untuk memajukan bangsa Indonesia.

Kita tidak perlu mengkhawatirkan rakyat. Masalah kita adalah para elit. ■

